

SKRIPSI

**ANALISIS *WILLINGNESS TO ACCEPT* PEMBANGUNAN *CENTER POINT OF*
INDONESIA DI KOTA MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD DHAFA SYAHREZA AZIZULHAQ

A011191050



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

ANALISIS *WILLINGNESS TO ACCEPT* PEMBANGUNAN *CENTER POINT OF INDONESIA* DI KOTA MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD DHAFI SYAHREZA AZIZULHAQ

A011191050



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS WILLINGNESS TO ACCEPT PEMBANGUNAN CENTER POINT OF
INDONESIA DI KOTA MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD DHAFA SYAHREZA AZIZULHAQ

A011191050

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 19 Desember 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Drs. A. Baso Siswadharna, M. Si.
NIP. 19611018 198702 1 001

Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si CWM®
NIP. 19770119 2008012 008

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



SKRIPSI

**ANALISIS WILLINGNESS TO ACCEPT PEMBANGUNAN CENTER POINT OF
INDONESIA DI KOTA MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD DHAFSA SYAHREZA AZIZULHAQ

A011191050

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada 19 Desember 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. A. Baso Siswadharna, M. Si.	Ketua	1. 
2	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si CWM®	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA.	Anggota	3. 
4	Randi Kumiawan, S.E., M.Sc	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD DHAFa SYAHREZA
AZIZULHAQ
Nomor Pokok : A011191050
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Jenjang : Sarjana (S1)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS WILLINGNESS TO ACCEPT PEMBANGUNAN CENTER POINT OF INDONESIA DI KOTA MAKASSAR** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Desember 2023

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the text '10000', 'METRAL TEMPEL', and '108A3AKX78342833'.

(Muhammad Dhafa Syahreza Azizulhaq)

A011191050

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang aman dan sejahtera. Atas izin dan kehendak Allah SWT skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin.

Dalam masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Sebab tanpa aadanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan studi.. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih teruntuk yang paling istimewa kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Syahrier Mustadjafr dan Ibunda Tasri Martang yang telah merawatku hingga dewasa, mendidikku, menyekolahkanku serta tiada henti dalam memberikan cinta, kasih sayang dan doa juga adik tercinta Zaky, serta keluarga yang telah banyak membantu baik berupa dukungan materil maupun moril dan doa yang senantiasa menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM®, CRA., CRP Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Sabir, SE., MSi., CWM® Selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

4. Bapak Drs A. Baso Siswadharna, M.Si Sebagai penasihat akademik serta selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih atas arahan, nasehat, bantuan, motivasi, saran, dukungan serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si CWM® Sebagai dosen pembimbing pendamping. Terima kasih atas bantuan yang diberikan, baik berupa kritik, saran, waktu, pikiran, maupun motivasi yang membantu penulis selama proses penulisan skripsi hingga selesai

6. Ibu Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA. sebagai dosen penguji penulis, terima kasih atas segala bantuan, arahan, saran serta motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan dan juga dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.

7. Bapak Randi Kurniawan, S.E., M.Sc Selaku dosen penguji, terima kasih atas segala arahan dan saran serta motivasi tiada henti yang diberikan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Ekonomi yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, baik pada waktu mengikuti perkuliahan maupun pada saat penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

9. Segenap pegawai akademik, kemahasiswaan, perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan pegawai departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah membantu dalam pengurusan administrasi selama masa studi penulis.

10. Kakak-kakak tentor dan pegawai JILC yang telah menjadi rumah belajar serta menjadi tempat penulis dalam mengembangkan diri.

11. Kak Didin, Kak Nong, Kak Kama, Kak Kahar, dan Kak Alifia serta seluruh rekan-rekan JILC TELLO BARU yang selalu penulis repotkan dan memberikan banyak pembelajaran kepada penulis.

12. Teman-teman kenshi UKM Shorinji Kempo Universitas Hasanuddin, terima kasih untuk segala ilmu dan cerita dimasa awal perkuliahaan penulis.

13. Teman-teman UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin, terima kasih sudah menjadi rumah dan keseruannya selama berproses bersama.

14. Terima kasih juga sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang terus kuat serta berjuang hingga sampai dititik ini. Terima kasih sudah mau mencoba untuk belajar hal-hal baru baik dalam kegiatan kemahasiswaan hingga kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kita masih terus kuat untuk menghadapi kisah berikutnya. Aamiin.

Pada akhirnya penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga karya ini terselesaikan. Terima kasih yang sebesarbesarnya. Semoga Tuhan meridhoi kita semua.

Makassar, 19 Desember 2023

Penulis

ABSTRAK**ANALISIS *WILLINGNESS TO ACCEPT* PEMBANGUNAN *CENTER POINT OF INDONESIA* DI KOTA MAKASSAR**

MUHAMMAD DHAFI SYAHREZA AZIZULHAQ
. A. BASO SISWADHARMA
NUR DWIANA SARI SAUDI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya kompensasi atas pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kota Makassar. Data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survei kuesioner serta wawancara langsung dengan masyarakat yang terkena eksternalitas negatif akibat pembangunan CPI di Kota Makassar. Adapun metode analisis *contingent valuation method* dengan berfokus pada keinginan untuk menerima dana kompensasi. Berdasarkan hasil penelitian ini jenis eksternalitas negatif yang dirasakan oleh responden antara lain kualitas air, polusi udara, kebisingan, dan tingkat kesehatan. Selanjutnya, Nilai dugaan rata-rata kesediaan menerima dana kompensasi responden adalah sebesar Rp172.702,5 per bulan. Nilai total WTA responden sebesar Rp18.200.000 per bulan.

Kata Kunci : Kompensasi, Eksternalitas, dan Pembangunan

ABSTRACT**ANALYSIS WILLINGNESS TO ACCEPT DEVELOPMENT CENTER POINT OF
INDONESIA IN MAKASSAR CITY**

MUHAMMAD DHAFSA SYAHREZA AZIZULHAQ

. A. BASO SISWADHARMA

NUR DWIANA SARI SAUDI

This research aims to analyze compensation costs for development *Center Point of Indonesia* (CPI) in Makassar City. This research data is primary data obtained through questionnaire surveys and direct interviews with communities affected by negative externalities due to CPI development in Makassar City. As for the analytical method *contingent valuation method* by focusing on the desire to receive compensation funds. Based on the results of this research, the types of negative externalities felt by respondents include water quality, air pollution, noise and health level. Furthermore, the estimated average value of respondents' willingness to receive compensation funds was IDR 172,702.5 per month. The total WTA value of respondents is IDR 18,200,000 per month.

Keywords: Compensation, Externalities, and Development

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Teori Barang Publik	16
2.1.2 Teori Eksternalitas	19
2.1.3 Penilaian Kerusakan Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan	24
2.1.4 Konsep <i>Willingness To Accept</i>	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	34
2.4 Hipotesis Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Lokasi Penelitian	38
3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.3 Metode Pengumpulan Data	38
3.3.1 Analisis Nilai WTA dari Masyarakat Terhadap Aktivitas Pembangunan <i>Center Point of Indonesia</i>	39
3.4 Definisi Operasional Variabel	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis.....	43

4.1.2 Keadaan Penduduk.....	44
4.2 Karakteristik Responden.....	45
4.2.1 Responden Menurut Kesiediaan Menerima Dana Kompensasi (WTA).....	46
4.2.2 Responden Menurut Eksternalitas Negatif Kualitas Air Yang Dirasakan.....	47
4.2.3 Responden Menurut Eksternalitas Negatif Polusi Udara Yang Dirasakan.....	49
4.2.4 Responden Menurut Eksternalitas Negatif Kebisingan Yang Dirasakan.....	51
4.2.5 Responden Menurut Eksternalitas Negatif Tingkat Kesehatan Yang Dirasakan	52
4.3 Analisis Nilai Dana Kompensasi Responden Akibat Eksternalitas Negatif	54
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	69
Lampiran 3 Rekap Data Responden	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar(orang)	44
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Menurut Kesiediaan Menerima Dana Kompensasi (WTA).....	46
Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Eksternalitas Negatif Kualitas Air Yang Dirasakan.....	48
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Menurut Eksternalitas Negatif Kualitas Air Yang Dirasakan.....	48
Tabel 4.5 Distribusi Responden Menurut Eksternalitas Negatif Polusi Udara Yang Dirasakan.....	49
Tabel 4.6 Deskripsi Responden Menurut Eksternalitas Negatif Polusi Udara Yang Dirasakan	50
Tabel 4.7 Distribusi Responden Menurut Eksternalitas Negatif Kebisingan Yang Dirasakan	51
Tabel 4.8 Deskripsi Responden Menurut Eksternalitas Negatif Kebisingan Yang Dirasakan	52
Tabel 4.9 Distribusi Responden Menurut Eksternalitas Negatif Tingkat Kesehatan Yang Dirasakan	53
Tabel 4.10 Deskripsi Responden Menurut Eksternalitas Negatif Tingkat Kesehatan Yang Dirasakan	53
Tabel 4.11 Distribusi WTA Responden Kota Makassar	56
Tabel 4.12 Total WTA Responden Kota Makassar.....	57
Tabel 4.13 Uji Validitas dan Uji Reabilitas	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 4.1 Dugaan Bid Curve WTA Responden Kelurahan Losari Kecamatan Ujungpandang Kota Makassar	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terciptanya masyarakat yang sejahtera merupakan cita-cita bagi semua bangsa di dunia. Tak terkecuali seperti Indonesia dan negeri-negara yang sedang berkembang lainnya. Cita-cita pembangunan tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya. Sumber daya tersebut menjadi aset penting bagi Indonesia terutama dalam upaya perkembangan perekonomian negara. Perkembangan perekonomian tersebut juga bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat berpartisipasi untuk mewujudkan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi yang berhasil yaitu ekonomi pembangunan yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat baik dari segi pertumbuhan ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berhasil juga ditandai oleh meningkatnya aktifitas kegiatan ekonomi, di mana permintaan suatu produksi barang akan meningkat dan mengakibatkan permasalahan yang akan berdampak pada kelestarian alam dan lingkungan (Fahrizal, 2016).

Pembangunan ekonomi yang berhasil yaitu ekonomi pembangunan yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat baik dari segi pertumbuhan ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berhasil juga ditandai oleh meningkatnya aktifitas kegiatan ekonomi, di mana permintaan suatu produksi barang akan meningkat dan mengakibatkan permasalahan yang akan berdampak pada kelestarian alam dan lingkungan (Amanda dan Fikriah, 2018).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan kesejahteraan hidup masyarakat (Todaro dan Smith, 1993).

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan, suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat ekonominya lebih tinggi dari apa yang dicapai pada masa sebelumnya atau dalam konteks wilayah memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten dan kota (Aryad, 2010).

Pembangunan yang dilakukan selama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun pada beberapa fenomena yang terjadi selalu ada pihak yang

merasakan dampak buruk dari adanya pembangunan tersebut. Hal itulah yang dikatakan sebagai eskternalitas negatif sebagai hasil dari pembangunan yang dilakukan. Proses produksi dan konsumsi telah menimbulkan adanya limbah yang kemudian akhirnya dikembalikan ke lingkungan (Yuniarti, 2019).

Revolusi industri 1.0 mengawali perubahan sejarah yang awalnya seluruh kegiatan mengandalkan tenaga hewan dan manusia digantikan dengan kemunculan mesin. Revolusi industri 1.0 pertama kali muncul pada tahun 1750an tepatnya di Negara Inggris. Pada saat itu terjadi sebuah revolusi besar – besaran di sektor pertanian, pertambangan, transportasi, manufaktur dan teknologi, serta memiliki dampak yang sangat besar pada bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Revolusi di Inggris ditandai dengan penemuan mesin uap pada akhir abad ke-18 sehingga menyebabkan pertumbuhan pada bidang industri. Sejarah mencatat, revolusi industri ini terjadi pada tahun 1800 – 1900 (Prasetyo dan Sutopo, 2018).

Revolusi ini ada sekitar abad 18 cirinya adalah adanya mesin dengan tenaga uap pertama kali dalam memproduksi barang-barang. Pada jaman dahulu mesin uap dipakai untuk alat menenun hal ini memberikan kemajuan di duni industri tekstil pada masanya. Yang asalnya segala sesuatu dikerjakan oleh manusia pada masanya tergantikan oleh teknologi yang ditemukan ini yaitu mesin uap (Sutia, 2021).

Pada masa kini kita dihadapkan dengan industri 4.0, industri dimana semua dilakukan dengan sistem otomatisasi dan robot. Semua nya berbanding jauh jika mundur kebelakang pada saat era industri 1.0 dimana semuanya belum berkembang pesat seperti sekarang. Banyaknya perubahan yang terjadi saat ini tidak lain karena adanya inovasi yang tercipta dari berkembang pemikiran pola

pikir manusia. Pengertian Revolusi Industri mengacu pada dua hal, pertama, yaitu perubahan cepat dalam teknologi pembuatan barang-barang, dan yang kedua perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dunia (Obie, 2018).

Namun, di balik kemajuan ekonomi dan teknologi yang ditunjukkan Revolusi Industri, ada kerugian besar. Dari kerusakan lingkungan hingga tumpukan nyawa yang melayang demi kerja, Revolusi Industri menyisakan sejarah gelap. Inilah beberapa dampak negatif Revolusi Industri bagi peradaban manusia di masanya. Karena semakin banyaknya pabrik-pabrik maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dan tingkat polusi semakin tinggi. Polutan-polutan tersebut secara umum dapat menimbulkan akibat seperti hujan asam yang dapat merusak hutan dan lahan pertanian. batu bara sebagai fondasi kejayaan Revolusi Industri. Cerobong asap industri menjulang tinggi, hal ini menyebabkan polusi udara memenuhi atmosfer Bumi (Sutia, 2021).

Fenomena kata pencemaran menjadi barang populis, semenjak revolusi industri berlangsung 1880 di Perancis. Kemudian memasuki abad ke-20 istilah pencemaran menjadi akrab dalam telinga, apalagi setelah terhubungkan dengan istilah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah adanya satu atau beberapa kontaminan di dalam udara atmosfer. Seperti debu, busa, gas, kabut, bau-bauan, asap atau uap dalam kuantitas yang banyak dengan berbagai sifat maupun lama berlangsungnya di udara. Sampai dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang maupun kelestarian kehidupan organisme lainnya (Musthofa dkk; 2017).

Kerusakan lingkungan tidak saja terjadi di negara-negara yang

mengalami perekonomian yang tumbuh pesat seperti China, misalnya namun juga terjadi di Negara- negara yang pertumbuhan ekonominya lambat seperti di Negara-negara Amerika Tengah. Kondisi ini terjadi karena banyak Negara yang memilih pendekatan *grow first, clean up later* seperti. Namun ternyata pendekatan *grow first, clean up later* merupakan strategi yang berbiaya tinggi secara sosial dan ekologi, dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri. Beberapa kerugian terhadap lingkungan seperti keanekaan hayati dan kesehatan manusia adalah contohnya (Thomas, 2001).

Ideologi pembangunan ekonomi baru yang berkembang cepat pada beberapa tahun belakangan ini merupakan model pembangunan ekonomi yang dikenal dengan ekonomi hijau (*economy*). Ekonomi hijau dikontraskan dengan model pembangunann ekonomi yang mengandalkan bahan bakar fosil, seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam. Ekonomi hijau berbasis pada pengetahuan dan teknologi yang bertujuan melihat saling keterkaitan antara sumberdaya manusia dengan ekosistem alam dan meminimalkan dampak aktivitas ekonomi manusia terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. *United Nation Environment Programme* (UNEP) menyebut sebagai kesepakatan global baru (*a Global Green New Deal*) bagaimana pemerintah dapat mendukung transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih hijau. Ekonomi hijau dipercaya bisa menjadi salah satu solusi mengatasi perubahan iklim (Yasa, 2010).

Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu paradigma pembangunan yang didasarkan kepada efisiensi pemanfaatan sumber daya (*resources efficiency*), pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (*sustainable consumption and production pattern*) serta internalisasi biaya-biaya lingkungan dan sosial (*internalization the externalities*) (*Carbon Economy*). *Green*

Economy juga merupakan sebuah paradigma pembangunan yang perlu dikedepankan dalam rangka pemerintah melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu *Green Economy* perlu dimasukkan dalam perencanaan program pembangunan ekonomi (Aswandi dan Saudi, 2023).

Berbagai pihak menuding bahwa penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan dan krisis sosial-lingkungan selama ini adalah akibat dari strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan pro-rakyat. Strategi dan kebijakan pembangunan nasional lebih mengutamakan pencapaian kepentingan ekonomi dari negara dan para pemilik modal dibanding kepentingan lingkungan dan masyarakat. Bahkan, lingkungan dan seluruh sumberdaya alam yang melekat padanya serta sumberdaya ekonomi masyarakat diakuisisi dan dieksploitasi secara serakah oleh negara dan para pelaku ekonomi untuk mewujudkan kepentingan pertumbuhan ekonomi negara dan laba korporasi (Lako, 2015).

Dalam suatu kegiatan ekonomi hendaknya memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi masyarakat. Salah satu kegiatan ekonomi adalah industrialisasi. Industrialisasi merupakan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri sebagai leading sektornya. Industrialisasi sering dikaitkan dengan teori penciptaan lapangan kerja. Sektor industri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah industri (Fahmi, 2016).

Pentingnya analisa eksternalitas dalam suatu industri untuk mengetahui kinerja perusahaan atau industri dalam memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, baik dampak positif maupun dampak negatif. Eksternalitas ada dua macam, yaitu eksternalitas positif dan negatif. Eksternalitas positif terjadi saat kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok memberikan manfaat pada individu atau kelompok lainnya (Sankar, 2008).

Pesatnya pertumbuhan sektor industri sebagai tulang punggungnya perekonomian memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dengan terjadinya degradasi mutu lingkungan. Semakin pesat pertumbuhan sektor industri akan mengakibatkan menurunnya mutu lingkungan jika industri tidak melakukan riset dan studi kelayakan (*feasibility study*) yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Polusi kegiatan produksi juga dapat menyebabkan fungsi lingkungan mengalami kemunduran. Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun positif bisa terjadi bersamaan. Suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan disebut sebagai eksternalitas (Prasetya, 2012).

Dalam proses produksi kita mengenal yang namanya eksternalitas, dimana salah satunya dikenal eksternalitas negatif, yang sifatnya merugikan masyarakat dengan pencemarannya yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Masalah kerusakan lingkungan hidup saat ini perlu sekali mendapat perhatian lebih dari semua elemen masyarakat terutama pihak pemerintah, mengingat alam yang kita tempati hanyalah pinjaman dari anak cucu, generasi masa depan, sehingga sebagai sebuah titipan kita harus dapat

mempertanggungjawabkannya. Untuk itu harus diupayakan ada aturan-aturan guna meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia baik dalam mereka memproduksi maupun dalam mengkonsumsi (Aida, 2009).

Eksternalitas adalah biaya atau manfaat transaksi pasar yang tak tercermin dalam harga. Tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Apabila ada eksternalitas maka ada pihak ketiga yang terkena dampak produksi dan konsumsi. Pihak ketiga adalah mereka yang menanggung beban misalnya karena air atau udara yang tercemar. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut (Rinawati, 2014).

Sebagai kota terbesar di Kawasan Indonesia timur dan juga merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dituntut untuk menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga Pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia. Berbagai macam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik, disamping meningkatkan sumber daya manusia. Salah satunya adalah pembangunan proyek *Center Point of Indonesia* (CPI) yang dimulai pada akhir tahun 2013 silam (Detik.com, 2022).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun

2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, CPI merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yakni Pusat Bisnis Global Terpadu Indonesia, dengan Luas areal yang akan diratakan dan dipadatkan mencapai 157 Ha yang terdiri dari 50 Ha milik pemerintah untuk fasilitas umum atau publik dan 107 Ha milik swasta sebagai kawasan bisnis namun, dari 107 Ha tersebut 30% akan dibuatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial juga seperti jalan, jembatan dan juga taman.

Pembangunan CPI sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Makassar dalam merespon pertumbuhan penduduk di Kota Makassar juga mengharuskan terjadinya pembangunan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Pertambahan penduduk serta perkembangan kegiatan usaha inilah yang pada akhirnya menuntut kebutuhan ruang. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari berbagai perubahan dan perkembangan tersebut. Dalam keadaan terbatas, dalam arti ruang tidak bertambah maka secara otomatis melahirkan permintaan penyediaan sarana dan prasarana seperti prasarana infrastruktur kota. Untuk mendapatkan lahan, maka kota-kota besar termasuk Kota Makassar melihat wilayah pesisir yang umumnya memiliki kualitas lingkungan hidup yang rendah. Fenomena ini bukan saja dialami di Indonesia, tapi juga dialami negara-negara maju, sehingga wilayah pesisir menjadi perhatian dan tumpuan harapan dalam menyelesaikan penyediaan hunian penduduk perkotaan.

Penyediaan lahan di wilayah pesisir dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau habitat yang sudah ada, seperti perairan pantai, lahan basah, pantai berlumpur dan lain sebagainya yang dianggap kurang bernilai secara ekonomi dan lingkungan sehingga dibentuk menjadi lahan lain yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan lingkungan atau dikenal dengan reklamasi.

Pembangunan melalui reklamasi pesisir pantai sering menimbulkan masalah lingkungan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati pantai, penurunan kualitas air laut dan juga penurunan produksi ikan tangkap. Untuk itu, di beberapa Negara membuat aturan penanganan kontrol yang lebih ketat untuk reklamasi (Ramaniya, 2017).

Reklamasi yang tidak memperhatikan pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dapat mengakibatkan degradasi lingkungan pesisir, hal ini sangat berpengaruh terhadap hilangnya potensi sumber daya hayati pesisir terutama beberapa biota laut yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, begitu juga pada aspek sosial ekonomi masyarakat, bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan selain melaut, mereka tidak memiliki alternatif usaha lain selain menjadi buruh nelayan, dengan adanya reklamasi akan mempengaruhi hasil tangkapan dan berimbas pada penurunan pendapatan mereka. Oleh karena itu, perlu suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, yang tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan saja tetapi juga aspek sosial ekonomi masyarakat, sehingga dampak sosial ekonomi masyarakat juga dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pemerintah selaku pengampu kebijakan (Mustaqim, 2015).

Dengan adanya kegiatan reklamasi, wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan berkurang karena dimanfaatkan bagi kegiatan privat. Keanekaragaman hayati laut juga berkurang, baik flora maupun fauna, karena timbunan tanah urugan mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Sistem arus hidrologi air laut akan berubah. Disamping itu, kegiatan reklamasi juga berdampak pada aspek sosial masyarakat, kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah petani tambak, nelayan dan buruh yang

akan berpengaruh pada hasil tangkapan dan penurunan kualitas hidup mereka (Asmayanti, 2018). Perlu diingat pesatnya pembangunan memang menjadikan ekonomi sektor industri tumbuh pesat, namun selalu diimbangi dengan pesatnya degradasi mutu lingkungan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan dengan itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukan sebuah konsep tentang pentingnya lingkungan hidup. Paradigma pembangunan berkelanjutan juga bukan tentang pembangunan ekonomi. Ini sebuah etika politik pembangunan mengenai pembangunan secara keseluruhan dan bagaimana pembangunan itu seharusnya dijalankan (Keraf, 2002).

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di dalam UU No.23 Tahun 1997 UUPH adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna. oleh sebab itu maka setiap keputusan pembangunan harus

memasukkan berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek lingkungan, disamping pengentasan kemiskinan dan pola konsumsi sehingga hasil pembangunan akan memberikan hasil yang paling baik bagi peningkatan kualitas hidup manusia (Warlina, 2009).

Eksternalitas lingkungan sendiri didefinisikan sebagai manfaat dan biaya yang ditunjukkan oleh perubahan lingkungan secara fisik hayati. Dengan adanya pembangunan *Center Point of Indonesia* menjadikan saluran pembuangan yang seharusnya menuju laut menjadi terhambat dikarenakan adanya proyek *Center Point of Indonesia*. Hal itu bisa kita perhatikan dengan air yang menghitam dan bau yang kurang sedap disekitaran anjungan Pantai Losari hingga kawasan Lego-Lego. Polusi air yang telah dijelaskan di atas termasuk ke dalam eksternalitas lingkungan, dimana polusi tersebut telah merubah baik secara fisik maupun hayati pantai yang ada di sekitar CPI (Owen, 2004).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 12 dengan bunyi pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Selain air, udara, dan juga tanah, serta hubungan timbal balik di antara air, udara, dan tanah dapat berpotensi mengalami eksternalitas lingkungan. Adanya asap dan konsentrasi bahan-bahan beracun serta global warming merupakan contoh dari polusi udara. Adapun sampah tidak berbahaya dan limbah beracun merupakan contoh dari polusi tanah. Polusi limbah beracun jelas berbahaya dan merupakan masalah serius, sedangkan sampah rumah

tangga merupakan masalah polusi juga, apalagi jika sampah tersebut dibuang ke sungai atau ke tempat yang tidak semestinya. Emisi gas rumah kaca menyebabkan global warming, yang dihasilkan dari emisi karbon dioksida, methane, nitrus oxida, dan gas lainnya (Yuniarti, 2019).

Dibangunnya proyek CPI yang dimulai pada tahun 2015 diharapkan menghasilkan eksternalitas positif yang mampu mendorong perekonomian masyarakat Kota Makassar . Sebelum dibangunnya proyek CPI, persentase laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar cenderung menurun sejak tahun 2011 hingga 2014. Namun Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar beserta pihak lainnya tidak boleh menghiraukan adanya eksternalitas negatif yang akan muncul sebagai dampak dari pembangunan CPI yang terletak di daerah pesisir. Sehingga keberadaan CPI dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Makassar dan menjadikan CPI sebagai salah satu ikon atau *landmark* yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar (Suhairah, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar nominal eksternalitas negatif yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar proyek dibangunnya *Center Point of Indonesia* (CPI) yang berdampak pada polusi udara, kebisingan, dan kualitas air. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih penelitian yang berjudul “Analisis *Willingness To Accept* Masyarakat Akibat Eksternalitas Negatif Aktivitas Pembangunan *Center Point Of Indonesia* Di Kota Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengungkapkan permasalahan :

1. Apakah bentuk eksternalitas negatif yang dirasakan masyarakat akibat pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar ?
2. Berapa besar *Willingness to Accept* (WTA) masyarakat akibat pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk eksternalitas negatif dan untuk mengetahui seberapa besar masalah yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.
2. Mengkuantifikasikan besarnya nilai kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat (WTA) akibat pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI) Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan dan referensi yang berguna bagi pengambilan keputusan dimasa yang akan datang oleh Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, dan pihak terkait.
2. Memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang dampak pembangunan *Center Point of Indonesia* di Kota Makassar.

3. Dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan akademi dan peneliti yang ingin menunjukkan penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Barang Publik

Teori Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan barang publik) (Mangkoesebroto, 2003).

Pada teori ini kurva kepuasan akan barang publik ditunjukkan oleh kurva UU. Dimana kurva tersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan maka akan semakin rendah kepuasan marginalnya yang dirasakan masyarakat. Di lain pihak, semakin banyak pajak yang dipungut, semakin besar rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Oleh karena itu kurva ketidakpuasan marginal akan pembayaran pajak mempunyai bentuk yang meninggi (Mangkoesebroto, 2003).

Ketidakpuasan marginal ditunjukkan dengan sumbu tegak dari titik O kebawah dan kurva ketidakpuasan marginal ditunjukkan oleh kurva PP. Titik E adalah keadaan optimum dimana bagi masyarakat kepuasan marginal bagi barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak (Murniati, 2017).

Menurut Pigou barang publik seharusnya disediakan hingga tingkat kepuasan individu atas barang publik sama dengan ketidakpuasan akan pajak yang diambil guna membiayai program pemerintah atas penyediaan barang publik tersebut. Kelemahan dalam teori Pigou didasarkan dengan ketidakpuasan

individu dalam membayar pajak atau retribusi setelah disediakan barang publik tersebut. Antara kepuasan dan ketidakpuasan tersebut hanya diukur dengan cara kuantitatif karena sifatnya yang ordinal (Ahsan, 2022).

Bowen yang berbicara mengenai pengadaan yang berwujud barang publik itu berlandaskan pada teori harga yang dapat dikatakan sama dengan yang disebut barang swasta dan teori ini menjabarkan tentang penjelasan barang publik itu sendiri dari beberapa kacamata atau sudut pandang yang berbeda-beda terhadap penyediaan tersebut, harga dari pasaran, kepuasan konsumen, cara melakukan pembayaran, dan juga mengenai karakteristik dari barang-barang tersebut (Ahsan, 2022).

Teori yang didasarkan pada teori harga sama halnya pada penentuan harga pada barang swasta. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang dimana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut (Khusaini, 2019).

Teori Lindahl mirip dengan yang dikemukakan oleh Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut akan tetapi berupa presentase dari total biaya penyediaan barang publik. Analisa Lindahl didasarkan pada analisa kurva indifferen dengan anggaran tetap yang terbatas (*fixed budget constraints*) (Surbakti, 2013).

Dalam teori barang publik suatu barang diperbolehkan untuk digunakan oleh tiap individu namun tidak mengurangi jumlah konsumsi oleh individu lainnya. Barang publik tidak mengecualikan siapa saja yang boleh memakai maupun mengkonsumsinya serta tidak perlu mengeluarkan biaya. Secara terminologi

barang publik memiliki arti bahwa suatu jenis produk tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat memiliki sifat tidak mengurangi jumlah barang yang tersedia dan tidak terkecuali tersedia serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pada dasarnya barang publik tidak menimbulkan ketertarikan pihak swasta karena sifatnya yang dianggap tidak menguntungkan (Ahsan, 2022).

Barang publik (*public goods*) atau barang sosial (*social goods*), atau barang kolektif (*collective goods*) adalah barang yang bebas dikonsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk turut menikmatinya barang yang tidak ada tandingan dalam konsumsi dan/atau manfaat tidak bisa dipisahkan (Case dan Fair, 2019).

Barang publik (*public goods*) memiliki 2 karakteristik, yaitu pertama tidak ada pesaing (*non rivalry*) dalam konsumsi Suatu barang bersifat non rival jika untuk suatu level produksi tertentu, biaya pembiayaan marginal kepada seorang konsumen tambahan adalah nol. Untuk kebanyakan barang yang disediakan secara swasta atau privat, biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut secara lebih banyak adalah positif. Tetapi untuk sejenis jumlah barang, para konsumen tambahan tidak memberikan biaya (Sumarsono, 2007).

Kedua tidak bersifat eksklusif atau sulit memperolehnya (*non-exclusive*) sifat pertama yang membedakan barang-barang publik dengan barang-barang lainnya adalah apakah orang-orang bisa menikmati barang-barang yang dibeli dan dimilikinya secara sendiri-sendiri atau tidak. Untuk barang-barang privat, biasanya eksklusivitas ini bisa dilakukan. Jadi kalau barang-barang privat bisa dipisahkan pengkonsumsianya, maka barang-barang publik sangat sulit dipisah

pisahkan pengonsumsianya. Barang bersifat noneklusif jika orang-orang tidak dapat diabaikan dalam pengkonsumsianya. Sebagai akibatnya, sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengenakan biaya atas orang-orang yang menggunakan barang-barang noneklusif (barang-barang yang dapat dinikmati tanpa membayar secara langsung) (Sumarsono, 2007).

Konsep-konsep *non-exclusive* dan *non-rivaly* dalam banyak hal berhubungan erat satu sama lain. Kebanyakan barang yang tidak bisa dipisahkan pengkonsumsianya (*non-exclusive*) juga bersifat tidak bersaing (*non-rivaly*) pertahanan nasional dan pengontrolan nyamuk adalah dua contoh barang yang sulit dipisahkan pengkonsumsian unit-unit tambahan melibatkan biaya menejerial sosial nol.

2.1.2 Teori Eksternalitas

Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/pihak lain. Jika dampaknya merugikan, maka hal itu disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika dampaknya menguntungkan disebut eksternalitas positif (Mankiw, 2012).

Teori Eksternalitas ingin menerangkan ketika kita melakukan tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak akan mempengaruhi pihak yang lain. Eksternalitas terjadi apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi sehingga timbul inefisiensi (Mangkoesoebroto, 2014).

Eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat (*benefit to society*) maupun beban atau biaya (*cost on society*) dikarenakan adanya tindakan konsumsi atau produksi. Manfaat atau beban ini tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bertanggungjawab langsung dengan perusahaan tersebut dengan pemilik,

konsumen, pekerja, pemerintah, atau masyarakat, namun juga dirasakan oleh seluruh masyarakat lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas dan keberadaan perusahaan tersebut (Laili, 2021).

Eksternalitas dikatakan sebagai faktor-faktor yang mempunyai makna ekonomis namun tidak diikutsertakan dalam perhitungan ekonomis. Dampak yang bisa ditimbulkan dari eksternalitas bisa disebutkan eksternalitas positif dan eksternalitas negatif (Aida, 2009).

Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan pada pihak lain diluar aktivitas atau transaksi itu. Kadang disebut dengan tumpahan atau efek lingkungan (Karl dan Fair, 2007).

Jika dilihat dari dampaknya, eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan negatif. Eksternalitas positif diartikan sebagai dampak yang menguntungkan pihak lain tanpa perlu adanya kompensasi dari pihak yang memperoleh keuntungan. Sedangkan, eksternalitas negatif diartikan sebagai dampak yang merugikan pihak lainnya tanpa adanya kompensasi (Daraba, 2001).

Limpahan (*spill over*) dari manfaat atau beban ke masyarakat yang berkepentingan dengan aktivitas tersebut dinamakan eksternalitas, atau dampak keberadaan suatu aktivitas produksi atau konsumsi terhadap masyarakat luas yang tidak berhubungan atau berkepentingan langsung dengan aktivitas tersebut (Henry, 2015).

Ditinjau dari dampaknya, eksternalitas dapat dibagi menjadi dua yaitu; Eksternalitas positif adalah apabila dampak dari suatu tindakan terhadap orang

lain yang tidak memberikan kompensasi menguntungkan. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak positif dari keberadaan suatu aktivitas (produksi atau konsumsi) bila kualitas barang dan jasa sangat sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat. Eksternalitas positif terjadi ketika kegiatan yang dilakukan seorang individu atau kelompok tidak hanya memberikan manfaat pada individu atau kelompok tersebut, tapi juga terhadap ilmu pengetahuan dan lingkungan secara keseluruhan. Eksternalitas dapat disebut sebagai eksternalitas positif apabila kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok memberikan manfaat pada individu atau kelompok lainnya (Sankar, 2008).

Eksternalitas negatif adalah apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan. Eksternalitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup (seperti polusi air dan udara, kebisingan, suara rebut-ribut) semuanya mempengaruhi kepuasan orang lain. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak negatif dari kegiatan konsumsi dan produksi bila kualitas konsumsi dan produksi barang dan jasa menghasilkan limbah kerugian atau konsumsi barang dan jasa menghasilkan limbah kerugian atau kesulitan (*harmfull spill over*) bagi masyarakat. Dengan kata lain, eksternalitas negatif terjadi apabila aktivitas produksi atau konsumsi menimbulkan beban, gangguan, kerugian atau biaya bagi masyarakat (*cost on society*) (Istikomah, 2018).

Eksternalitas negatif muncul ketika pasar tidak mampu mencapai keseimbangan yang efisien. Keseimbangan yang efisien adalah situasi di mana biaya sosial marjinal sama dengan manfaat sosial marjinal. Eksternalitas negatif adalah bentuk kegagalan pasar, yang berarti bahwa pasar tidak mampu mencapai keseimbangan yang efisien dimana ketika total benefit transportasi

pribadi dimaksimalkan sehingga tidak ada cara untuk meningkatkan manfaat pengguna jalan tanpa mengurangi benefit pengguna jalan lainnya. Biaya eksternalitas pada masyarakat umumnya tidak tercermin dalam harga pasar saat ini di sektor transportasi (Maibach dkk., 2008).

Eksternalitas negatif adalah apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan. Eksternalitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup (seperti polusi air dan udara, kebisingan, suara ribut-ribut) semuanya mempengaruhi kepuasan orang lain. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak negatif dari aktivitas konsumsi maupun produksi bila kuantitas produksi atau konsumsi barang dan jasa menghasilkan limbah kerugian atau konsumsi barang dan jasa menghasilkan limbah kerugian atau kesulitan (*harmfull spill over*) bagi masyarakat. Eksternalitas bisa terjadi karena agen-agen ekonomi mempengaruhi aktivitas agen-agen ekonomi lainnya tanpa direfleksikan dalam transaksi-transaksi pasar.

Salah satu contoh eksternalitas negatif adalah penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon secara liar sehingga akan berdampak rusaknya ekosistem di daerah tersebut. Seperti meningkatnya risiko tanah longsor hingga hilangnya rumah bagi hewan yang tinggal di pohon atau hutan tersebut. Sehingga masyarakat atau pihak yang tidak berkaitan dengan kegiatan tersebut akan merasakan dampak yang merugikan mereka terhadap adanya penebangan liar tersebut.

Eksternalitas merupakan dampak yang timbul dari sebuah kegiatan. Eksternalitas yang memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia adalah eksternalitas lingkungan. Eksternalitas lingkungan didefinisikan sebagai

manfaat dan biaya yang ditunjukkan oleh perubahan lingkungan secara fisik hayati (Owen, 2004).

Pencemaran air yang terjadi pada proyek pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI) termasuk dalam eksternalitas lingkungan. Pencemaran tersebut telah merubah secara fisik maupun hayati laut yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Solusi bagi pencemaran tersebut dapat mengacu pada UU No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 12, adalah sebagai berikut: "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya".

Berdasarkan pengertian eksternalitas lingkungan di atas, selain air, udara dan juga tanah dapat berpotensi mengalami eksternalitas lingkungan. Asap yang ditimbulkan dari kegiatan pabrik dengan bahan-bahan yang beracun serta global warming merupakan contoh dari polusi udara. Menumpuknya sampah tidak berbahaya yang dihasilkan dari kegiatan produksi dan limbah beracun merupakan contoh dari polusi tanah. Polusi yang beracun tentunya berbahaya dan merupakan masalah yang harus segera ditangani, sedangkan sampah rumah tangga juga merupakan masalah polusi, terlebih jika sampah tersebut dibuang ke sungai atau tempat yang tidak semestinya. Emisi gas rumah kaca dapat menyebabkan global warming (Profilidis, 2014).

Selain eksternalitas tersebut, ada juga eksternalitas suara atau kebisingan. efek kebisingan mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir akibat beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu

urbanisasi, mobilitas, dan industrialisasi aktivitas manusia yang berkelanjutan (Profildis, 2014).

Eksternalitas terjadi ketika utilitas individu tidak hanya bergantung pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu yang bersangkutan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas individu yang lain. Sehingga misalnya fungsi utilitas individu A dipengaruhi oleh jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu A ($x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$), dan juga dipengaruhi oleh aktivitas individu B yakni y_1 , maka fungsi utilitas A menjadi : $U_A = U_A(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, Y_1)$ (Cullis dan Jones, 1992).

2.1.3 Penilaian Kerusakan Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Bahwa penilaian barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu sumberdaya alam dan lingkungan dapat dinilai secara moneter. Barang dan jasa yang dihasilkan tersebut seperti batu kerikil, ikan, kayu, air bahkan pencemaran sungai pun dapat dihitung nilai rupiah atau nilai ekonominya karena diasumsikan bahwa pasar itu kongkrit/eksis (*market based*), sehingga transaksi barang dari sumberdaya alam tersebut dapat dilakukan (Fauzi, 2004).

Secara umum nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang dengan mengorbankan barang dan atau jasa atau jumlah minimum seseorang mau menerima kompensasi untuk mendapatkan suatu barang dan atau jasa lainnya. Secara hakikatnya konsep inilah yang kemudian disebut sebagai penilaian ekonomi sumberdaya. Dengan menggunakan pengukuran ini, nilai ekologis ekosistem bisa "diterjemahkan" ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasanya (Fauzi, 2004).

Teknik untuk menilai manfaat perubahan lingkungan dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu ; Suatu perhitungan yang langsung berdasarkan pada

nilai pasar atau produktivitas. Suatu perhitungan yang menggunakan nilai pasar substitut (penganti) atau komplementer (pelengkap). Suatu perhitungan pendekatan yang menggunakan teknik survei (Hufschmidt, dkk 1987).

Penggunaan metode analisis biaya dan manfaat (*Cost-Benefit analysis/CBA*) yang konvensional sering tidak memasukkan manfaat ekologis di dalam analisisnya, sementara itu pengambil kebijakan seringkali tidak mengkuantifikasikan kerusakan tersebut dengan metode ekonomi yang konvensional. Persoalan itu yang kemudian menjadi dasar pemikiran lahirnya konsep valuasi ekonomi, khususnya valuasi non-pasar (*non-market valuation*). Secara umum, teknik valuasi ekonomi sumberdaya yang tidak dapat dipasarkan (*on-market valuation*) dapat digolongkan ke dalam dua kelompok (Willis dkk, 2000).

Kelompok pertama adalah teknik valuasi yang mengandalkan harga pasar di mana *Willingness To Pay* (WTP) dan *Willingness To Accept* (WTA) ungkap melalui model yang dikembangkan. Teknik ini sering disebut teknik yang mengandalkan *revealed* WTP/WTA (keinginan membayar/menerima yang terungkap). Beberapa teknik yang termasuk ke dalam kelompok pertama ini adalah *travel cost* dan *hedonic pricing*. Kelompok kedua adalah teknik valuasi yang didasarkan pada survei di mana keinginan membayar/menerima responden diperoleh langsung dari responden, yang langsung diungkapkannya secara lisan maupun tertulis (Willis dkk, 2000).

Salah satu teknik yang cukup populer dalam kelompok ini adalah metode (*Contingent Valuation Method*). Metode CVM pada hakikatnya bertujuan mengetahui pertama, keinginan membayar (WTP) dari masyarakat misalnya perbaikan kualitas lingkungan (air, tanah, udara dan sebagainya); dan keinginan menerima (WTA) masyarakat misalnya pada persoalan kerusakan suatu

lingkungan perairan. Terdapat beberapa metode untuk mengukur nilai dari suatu lingkungan, diantaranya adalah *Hedonic pricing Method* (HPM), *Travel cost* (TCM), *Production Function Approach*, dan *Contingent Valuation Method* (Hanley dan Spash, 1993).

Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah CVM. penggunaan CVM ini dikarenakan beberapa pertimbangan diantaranya adalah dengan menggunakan CVM maka dapat secara langsung menghitung nilai suatu komoditi dengan titik berat preferensi individu menilai benda publik tersebut yang penekanannya pada standar nilai uang (Hanley dan Spash, 1993). Selain itu CVM mampu mengestimasi suatu nilai ekonomi sejumlah besar komoditi yang tidak di perjualbelikan di pasar seperti barang lingkungan, seperti yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Sehingga penggunaan metode CVM dalam penelitian ini dinilai sangat tepat. Pada dasarnya dalam CVM digunakan pendekatan secara langsung dengan menanyakan kepada masyarakat berapa maksimum kesediaan untuk membayar manfaat tambahan yang diperoleh dari penggunaan dan atau berapa besarnya kesediaan untuk menerima (WTA) konvensasi dari penurunan kualitas barang lingkungan. Pada penelitian ini, sudut pendekatan yang akan digunakan adalah WTA. Asumsi dasar CVM adalah individu memahami pilihan masing-masing dan mengenal betul kondisi lingkungan yang akan dijadikan objek penelitian. Selain itu akan dikatakan individu adalah apa yang sebenarnya akan dilakukan jika pasar untuk barang lingkungan tersebut benar-benar ada. Oleh karena itu, pasar hipotetik (kuesioner dan responden) harus sebisa mungkin mendekati kondisi pasar yang sebenarnya. Responden harus mengenal betul dengan baik barang yang akan tanyakan dalam kuesioner dan alat hipotetik yang dipergunakan dalam pembayaran (Hanley dan Spash, 1993).

Barang dan jasa lingkungan tergolong ke dalam barang *non market value*. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai dari suatu barang dan jasa lingkungan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi nilai dari barang dan jasa lingkungan adalah dengan *Contingent Valuation Method (CVM)*.

Metode CVM menggunakan pendekatan secara langsung dengan menanyakan kepada masyarakat atas kesediaan untuk membayar (WTP) akibat manfaat tambahan yang diperoleh dari perubahan lingkungan dan atau seberapa besar nominal kerusakan yang dirasakan masyarakat untuk menerima (WTA) kompensasi akibat penurunan kualitas barang lingkungan (Hanley dan Spash, 1993).

Contingent Valuation Method memiliki tujuan untuk menghitung nilai atau penawaran yang mendekati, jika pasar dari barang-barang lingkungan tersebut benar-benar ada. Asumsi dasar yang berlaku di CVM adalah bahwa individu-individu memahami benar pilihan masing-masing dan cukup mengenal kondisi lingkungan yang dinilai. Oleh karena itu, pasar hipotetik (kuisisioner dan responden) harus mendekati kondisi pasar sebenarnya. Responden harus mengenal secara baik barang yang ditanyakan dan alat hipotetik yang digunakan untuk pembayaran, seperti pajak dan biaya masuk secara langsung.

Tahapan-tahapan untuk mengetahui nilai WTA (Hanley dan Spash, 1993), adalah :

1. Membuat Pasar Hipotetik (*Setting Up the Hypothetical Market*)
2. Mendapatkan Penawaran Besarnya Nilai WTA/WTP (*Obtaining Bids*)
3. Memperkirakan Nilai Rata-Rata WTP dan/atau Nilai Tengah WTA (*Calculating Average WTP and/or Mean WTA*)
4. Memperkirakan Kurva Penawaran (*Estimating Bid Curve*)

5. Menjumlahkan Data (*Agregating Data*)
6. Mengevaluasi penggunaan CVM (*Evaluating the CVM Exercise*)

2.1.4 Konsep *Willingness To Accept*

Willingness To Accept (WTA) adalah sisi lain dari *Willingness To Pay* (WTP). WTA adalah sebuah konsep dimana jumlah minimum pendapatan seseorang untuk mau menerima penurunan suatu kepuasan. Dalam praktik pengukuran nilai ekonomi, WTP lebih sering digunakan ketimbang WTA karena WTA bukan pengukuran yang berdasarkan insentif sehingga kurang bagus jika di jadikan studi yang berbasis perilaku manusia (*behavioral model*) namun ukuran pada WTA memberikan cukup informasi tentang besarnya dana kompensasi yang tersedia diterima oleh masyarakat atas penurunan kualitas lingkungan disekitarnya yang setara dengan biaya perbaikan kualitas lingkungan tersebut. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penghitungan WTA untuk menilai peningkatan atau kemunduran suatu kondisi lingkungan (Hanley dan Spash, 1993).

Menghitung jumlah yang bersedia diterima oleh individu untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan karena adanya kegiatan pembangunan. Menghitung pengurangan nilai atau harga dari suatu barang akibat semakin menurunnya kualitas lingkungan. Melalui survei untuk menentukan tingkat kesediaan masyarakat menerima dana kompensasi dalam rangka mengurangi dampak negatif pada lingkungan atau untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik.

Penghitungan WTA dapat dilakukan secara langsung (*direct method*) dengan melakukan survei dan secara tidak langsung (*indirect method*) dengan menghitung nilai dari suatu penurunan kualitas lingkungan yang telah

terjadi. Dalam penelitian ini perhitungan WTA dilakukan secara langsung (*direct method*) dengan cara survei dan wawancara terhadap masyarakat yang berada di wilayah pembangunan *Centre Point of Indonesia* (CPI).

2.2 Penelitian Terdahulu

Fatha (2020) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesiediaan Membayar (*Willingness To Pay*) Konsumen Terhadap Sayuran Organik Di Pasar Modern Purwokerto Dan Faktor Yang Memengaruhi” lokasi penelitian ini mengambil lima pasar modern Purwokerto, Penentuan responden konsumen sayur organik dilakukan menggunakan metode purposive sampling dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristik yang disesuaikan Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik konsumen sayuran organik, menganalisis besarnya nilai rata-rata kesiediaan membayar atau *Willingness to Pay* maksimum serta faktor yang memengaruhi kesiediaan membayar sayuran organik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan dilaksanakan di pasar modern Purwokerto pada bulan Agustus sampai September 2019. Pengambilan sampel secara Purposive Sampling yaitu sebanyak 100 orang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif, *Contingent Valuation Method* (CVM) dan Analisis Regresi Logistik. Faktor yang memengaruhi kesiediaan membayar secara signifikan adalah pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan sedangkan usia, jenis kelamin, status pernikahan, harga, dan kualitas tidak memiliki pengaruh signifikan.

Marwan (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Kemacetan Lalu Lintas dengan Pendekatan *Willingness to Accept* (Studi Kasus : Kecamatan Bogor Barat)” penelitian ini bertujuan mengetahui berapa besarnya nilai kerugian pengguna jalan akibat kemacetan dilihat dari nilai kompensasi

(WTA). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Contingent Valuation Method (CVM). Metode ini memiliki kemampuan untuk mengestimasi manfaat lingkungan dari berbagai sisi. Berdasarkan hasil penelitian, kemacetan menyebabkan pengguna jalan merasakan lelah, stres, waktu yang hilang serta dampak terhadap penggunaan bahan bakar. Pengeluaran pembelian BBM dalam kondisi lalu lintas normal untuk pengguna mobil adalah sebesar Rp40.500,00 per mobil sedangkan motor Rp12.277,03 per motor. Namun apabila mereka terjebak dalam kemacetan maka biaya tersebut meningkat menjadi sebesar Rp52.159,09 per mobil dan Rp19.182,43 per motor. Potensi ekonomi BBM yang hilang akibat kemacetan di Kecamatan Bogor Barat setiap tahunnya mencapai Rp152.460.925.983,00 per tahun. Penggunaan metode CVM menghasilkan nilai rata-rata WTA yang diekspresikan responden untuk pengguna mobil sebesar Rp486.363,64, pengguna sepeda motor Rp366.000,00 dan penumpang angkutan umum Rp289.642,86.

Priyambodo (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Willingness to Accept* Petani dan *Willingness to Pay* Konsumen Sayuran Organik di Batu Malang Jawa Timur” Penelitian ini dilakukan pada Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji Batu Jawa Timur. Data pada penelitian ini dikumpulkan dalam pemikiran dan penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei melalui wawancara langsung ke petani sayuran yang ada di tempat penelitian dan konsumen sayuran organik yang ada di Kota Malang. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar petani yang melakukan usahatani sayuran non organik yang diperoleh dari ketua kelompok tani. Berdasarkan daftar petani tersebut dilakukan pemilihan sampel secara acak jumlah sampel sebanyak 26 orang petani. Jumlah sampel dalam penelitian ini

adalah 46 orang responden konsumen yang dibagi sesuai masing-masing Kecamatan. Nilai rata-rata minimum WTA setiap komoditas per kilogramnya antara lain wortel adalah Rp6692.3,00 ; Brokoli sejumlah Rp23115,00; Kentang sejumlah R10269,00 dan sejumlah Cabai Merah sejumlah Rp27019,00. Nilai rata-rata maksimum WTP setiap komoditas ditingkat konsumen per kilogramnya adalah wortel sejumlah Rp. 18977.78; Brokoli sejumlah Rp. 37800,00; Kentang sejumlah Rp34000,00; Cabai Merah Sejumlah Rp21566.67.

Andini Tribuana Tunggadewi dan Urmatul Uska Akbar (2022) melakukan penelitian dengan judul "Analisis *Willingness to Accept* Dana Kompensasi Masyarakat Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang. Penelitian ini bertujuan melihat beberapa permasalahan lingkungan yang muncul antara lain: pencemaran air dan tanah, polusi udara, serta terbatasnya lahan di tiap kawasan TPA yang kemudian memicu konflik dengan masyarakat sekitar termasuk di sekitar TPA Cipeucang serta untuk menganalisis kesediaan masyarakat dalam menerima dana kompensasi dan menghitung besarnya nilai dana kompensasi (*Willingness to Accept*) yang bersedia diterima masyarakat. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat (responden) menerima dana kompensasi dilakukan menggunakan analisis regresi logistik. Sementara itu, analisis *Willingness to Accept* (WTA) sebagai gambaran besaran dananya dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan sebagian besar responden (masyarakat) bersedia menerima dana kompensasi dengan nilai rata-rata WTA sebesar Rp254.100 per bulan.

Sukma (2018) melakukan penelitian dengan judul "Analisis *Willingness To Accept* Masyarakat Akibat Eksternalitas Negatif Aktivitas Penambangan Batu Kapur Pabrik Semen Bosowa Di Kabupaten Maros" penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dampak eksternalitas negatif, besarnya nilai WTA, dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai WTA masyarakat dari aktivitas penambangan batu kapur pabrik semen bosowa di Kabupaten Maros. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. Data dianalisis secara deskriptif, pendekatan CVM, dan regresi linier berganda pada aplikasi *Eviews9.0*. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dampak eksternalitas negatif yang dirasakan dari aktivitas penambangan batu kapur pabrik semen bosowa di Kabupaten Maros adalah pencemaran udara, kebisingan dan getaran, perubahan kualitas dan kuantitas air. Nilai total WTA masyarakat sebesar Rp 1.636.375.000. Dan ditemukan juga bahwa Pendidikan, Pendapatan, Jarak Tempat Tinggal dan Biaya Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap WTA masyarakat dari aktivitas penambangan batu kapur pabrik semen bosowa di Kabupaten Maros.

Tampubolon (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Willingness to Accept* Masyarakat Akibat Eksternalitas Negatif Kegiatan Penambangan Batu Gamping”. Lokasi penelitian tersebut mencakup Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Eksternalitas negatif yang dialami masyarakat diidentifikasi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Peluang kesediaan menerima dana kompensasi masyarakat dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Besarnya nilai WTA masyarakat diketahui dengan menggunakan perhitungan WTA. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan kehilangan keanekaragaman hayati. Mayoritas responden menyatakan bersedia menerima dana kompensasi atas eksternalitas negatif yang timbul. Nilai dugaan rata-rata

WTA responden adalah sebesar Rp 137.500,00 per bulan per kepala keluarga dan nilai total WTA responden sebesar Rp 6.325.000,00 per bulan. Nilai total WTA masyarakat adalah sebesar Rp 447.975.000,00 per bulan. Faktor-faktor yang berpengaruh pada besarnya nilai WTA responden adalah tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dummy wiraswasta dan pegawai swasta.

Seong-Hoon Cho, SeungGyu Kim, dan Roland K. Roberts (2011) melakukan penelitian dengan judul "*Negative Externalities on Property Values Resulting from Water Impairment: The Case of the Pigeon River Watershed*" penelitian yang berlokasi di Sungai Pigeon, Carolina Utara berfokus pada penurunan kualitas air sebagai bentuk eksternalitas negatif yang dirasakan masyarakat disekitar aliran Sungai Pigeon akibat dari adanya pabrik kertas. Sehingga penduduk Carolina Utara yang memanfaatkan aliran Sungai Pigeon sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari terpaksa menanggung efek berbahaya dari adanya limbah pabrik kertas yang membuang limbahnya di Sungai Pigeon.

Marco Ravina, Deborah Panepinto, dan Mariachiara Zanetti (2019) melakukan penelitian dengan judul "*Air Quality Planning and the Minimization of Negative Externalities*" penelitian yang berfokus pada kualitas udara Negara Uni Eropa yang diwajibkan untuk merancang *appropriate air quality plans* (AQPs) atau rencana kualitas udara untuk melihat kemungkinan tindakan pengurangan emisi untuk meningkatkan kualitas udara. Penelitian ini menunjukkan berbagai efek yang dialami akibat dari pertumbuhan ekonomi. Seperti efek rumah kaca dan perubahan iklim secara local, dengan emisi polutan yang mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Sehingga bisa menjadi langkah-langkah non

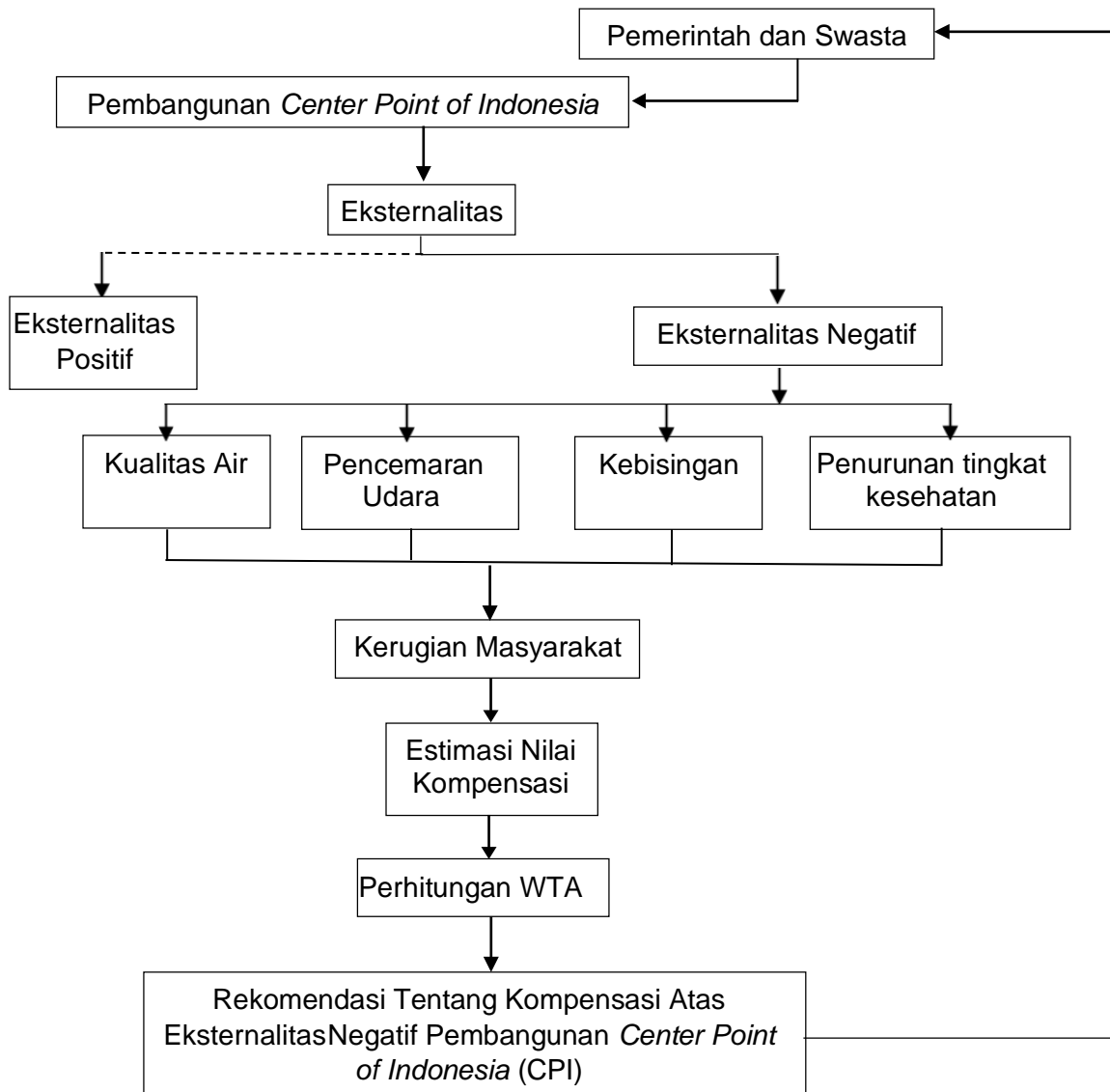
teknis untuk mitigasi kualitas udara dan perubahan iklim dalam pengembangan kebijakan yang akan diambil oleh Uni Eropa.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian dibuat untuk mempermudah proses pelaksanaan penelitian, maka dibuat alur kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

Reklamasi merupakan salah satu bentuk aktivitas pemanfaatan terhadap sumberdaya alam. Kegiatan ini menimbulkan eksternalitas baik eksternalitas positif maupun negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Peningkatan pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja, pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan usaha mikro di sekitar lokasi tambang merupakan bentuk-bentuk eksternalitas positif yang timbul dari aktivitas reklamasi. Akan tetapi, eksternalitas negatif dari kegiatan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat berupa eksternalitas negatif seperti pencemaran laut, kebisingan, dan penurunan tingkat kesehatan.

Kerugian yang dialami masyarakat perlu kajian yang mendalam mengenai hal tersebut. Kajian tersebut menyangkut tentang dampak eksternalitas negatif yang dirasakan masyarakat akibat reklamasi pantai dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Besarnya dana kompensasi yang bersedia diterima oleh masyarakat dengan menggunakan perhitungan *Willingness To Accept*.



Keterangan = - - - - - = Diluar penelitian

———— = Dalam penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Pembangunan *Center Point of Indonesia* di Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Kualitas air, polusi udara, kebisingan, dan tingkat kesehatan adalah bentuk eksternalitas negatif yang dirasakan masyarakat akibat Pembangunan *Center Point of Indonesia* di Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.
2. Besar nilai kompensasi yang bersedia diterima oleh masyarakat (WTA) akibat Pembangunan *Center Point of Indonesia*.